

**ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PADA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR**

Oleh:

RAKHMAT HIDAYAT*
MAHFUD NURNAJAMUDDIN**
MASDAR MAS'UD***

***Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia**

****Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Indonesia**

*****Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Indonesia**

email : rakhmatazka@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Dalam penelitian ini menganalisis pada efektivitas pengelolaan keuangan dan efisiensi pengelolaan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar pada tahun anggaran 2011 s.d. 2015 sebagai berikut: 1) efektivitas pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar pada kategori cukup efektif, karena nilai efektivitasnya 93,89 persen. 2) efisiensi pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar pada kategori efisien, karena nilai efisiensinya 15,39 persen. Dengan demikian disarankan kepada pihak penentu kebijakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar dapat mempertahankan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan sehingga hasil yang dicapai dapat mencerminkan kinerja pegawai dan organisasi.

Kata kunci: kinerja pengelolaan keuangan

ABSTRACT

This research aims to analyze and experts the performance finance management for Official Income Area of Makassar City. In this research analyze the effectiveness finance management and efficiency finance management. The results conducted that performance finance management at Official Income Area of Makassar City from 2011 to 2015 as follows: 1) effectiveness finance management at Official Income Area of Makassar City quite effective category, because the level effectiveness is 93,89 percent. 2) efficiency finance management at Official Income Area of Makassar City efficient category, because the level efficiency is 15,39 percent. So suggested to the policy makers at Official Income Area of Makassar City to maintain and encrease the effectiveness and efficiency finance management until the outcomes could shown the performance of employees and organizations.

Keywords: Performance finance management

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan fenomena perubahan cara pandang dalam menjalankan pemerintahan. Orientasi sentralistik yang memiliki otoritas kekuasaan bergeser ke arah desentralisasi yang mengutamakan otonomi dan pemberdayaan masyarakat lokal. Pergeseran ini didukung dengan tuntutan demokratisasi yang berkembang dewasa ini. Model *good governance* merupakan sebuah jawaban untuk mengelola urusan-urusan publik yang semakin kompleks (Halim dan Iqbal, 2012).

Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maka terjadi perubahan dalam tata pemerintahan yakni pemberian kesempatan pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah.

Menurut Yani (2009) dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Menurut Halim dan Iqbal (2012) salah satu kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom adalah kewenangan dalam bidang keuangan daerah yang meliputi: 1) pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah; 2) penyelenggaraan, pengurusan, pertanggungjawaban, pengawasan keuangan daerah dan 3) penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Darise (2008:2) hakikat otonomi daerah harus tercermin dalam pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan *good governance*.

Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut. Dengan pemberian otonomi daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik difokuskan untuk mengelola sistem dana secara desentralisasi dengan transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas (Bastian, 2006:2).

Konsekuensi dengan diberlakukannya otonomi daerah yakni pemerintah kabupaten/kota harus mampu mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan, menentukan arah kebijakan pembangunan serta kemandirian dalam hal pembiayaan program-program

pembangunan. Oleh karena itu kabupaten/kota dituntut untuk meningkatkan kemampuannya dalam merencanakan, menggali, mengelola, dan menggunakan sumber-sumber keuangan sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim dan Kusufi, 2012).

Menurut Mahmudi (2010:2) tujuan pelaksanaan otonomi daerah tersebut secara umum adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik, meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, serta mendorong demokratisasi di daerah.

Dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan obyek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu memberikan penjelasan hasil penelitian dengan menggunakan tabel, gambar dan grafik dengan persentase data yang diolah. Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2016 di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

Setelah data diperoleh maka dilakukan analisis data, dengan menggunakan:

Analisis deskriptif kualitatif, analisis data untuk mengungkapkan dan memahami kebenaran yang diperoleh dari pengamatan sumber data sekunder, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dari obyek penelitian.

Rasio efektivitas, dalam hal ini rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Sedangkan rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar terdiri dari pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan belanja daerah sesuai dengan alokasi anggaran yang diterima. Sumber pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar adalah pajak daerah dan retribusi daerah.

Efektivitas pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar pada penelitian ini adalah berdasarkan pada besarnya realisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang dibanding dengan target penerimaan PAD yang ditetapkan berdasar potensi ril daerah. Sumber pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Efektivitas pajak daerah dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1. Efektivitas Pajak Daerah Dispenda
Tahun Anggaran 2011 s.d. 2015

No.	Tahun	Target Pajak Daerah (Rp.)	Realisasi Pajak Daerah (Rp.)	Efektivitas (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2011	260,486,460,000.00	270,547,821,316.00	103.86
2	2012	337,167,338,150.00	388,445,926,266.00	115.21
3	2013	460,567,090,000.00	518,703,083,895.00	112.62
4	2014	672,081,995,000.00	561,697,247,680.00	83.58
5	2015	785,486,018,000.00	635,647,206,877.06	80.92
Jumlah		2,515,788,901,150.00	2,375,041,286,034.06	94.41
Rata-rata		503,157,780,230.00	475,008,257,206.81	94.41

Sumber: Kantor Dispenda Kota Makassar, tahun 2016

Berdasarkan pada tabel 1 diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat efektivitas pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar tahun anggaran 2011 sampai dengan 2015 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011 sebesar 103,86 persen sehingga tingkat efektivitasnya dikategorikan sangat efektif, pada tahun 2012 sebesar 115,21 persen sehingga tingkat efektivitasnya dikategorikan sangat efektif, pada tahun 2013 sebesar 112,62 persen sehingga tingkat efektivitasnya dikategorikan sangat efektif, pada tahun 2014 sebesar 83,58 persen sehingga tingkat efektivitasnya dikategorikan kurang efektif dan pada tahun 2015 sebesar 80,92 persen sehingga tingkat efektivitasnya dikategorikan kurang efektif.

Dengan demikian rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan keuangan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar adalah sebesar 94,41 persen per tahun. Keadaan ini menunjukkan bahwa efektivitas pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar berada dalam kategori cukup efektif.

Sedangkan efektivitas retribusi daerah dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Efektivitas Retribusi Daerah Dispenda
Tahun Anggaran 2011 s.d. 2015

No.	Tahun	Target Retribusi Daerah (Rp.)	Realisasi Retribusi Daerah (Rp.)	Efektivitas (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2011	9,405,596,000.00	6,679,140,352.00	71.01
2	2012	10,427,561,850.00	7,213,272,639.00	69.18
3	2013	9,876,064,000.00	7,801,477,003.00	78.99
4	2014	9,680,827,000.00	8,109,845,648.00	83.77
5	2015	15,963,925,000.00	9,101,781,365.00	57.01
Jumlah		55,353,973,850.00	38,905,517,007.00	70.28
Rata-rata		11,070,794,770.00	7,781,103,401.40	70.28

Sumber: Kantor Dispenda Kota Makassar, tahun 2016

Berdasarkan pada tabel 2, dapat dijelaskan bahwa tingkat efektivitas retribusi daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar tahun anggaran 2011 sampai dengan 2015 juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011 sebesar 71,01 persen sehingga tingkat efektivitasnya dikategorikan tidak efektif, pada tahun 2012 sebesar 69,18 persen sehingga tingkat efektivitasnya dikategorikan tidak efektif, pada tahun 2013 sebesar 78,99 persen sehingga tingkat efektivitasnya dikategorikan kurang efektif, pada tahun 2014 sebesar 83,77 persen sehingga tingkat efektivitasnya dikategorikan kurang efektif dan pada tahun 2015 sebesar 57,01 persen sehingga tingkat efektivitasnya dikategorikan tidak efektif.

Dengan demikian rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan keuangan retribusi daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar adalah sebesar 70,28 persen per tahun. Keadaan ini menunjukkan bahwa efektivitas retribusi daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar berada dalam kategori tidak efektif.

Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Efektivitas PAD Dispenda

Tahun Anggaran 2011 s.d. 2015

No.	Tahun	Target PAD (Rp.)	Realisasi PAD (Rp.)	Efektivitas (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2011	269,892,056,000.00	277,226,961,668.00	102.72
2	2012	347,594,900,000.00	395,659,198,905.00	113.83
3	2013	470,443,154,000.00	526,504,560,898.00	111.92
4	2014	681,762,822,000.00	569,807,093,328.00	83.58
5	2015	801,449,943,000.00	644,748,988,242.06	80.45
Jumlah		2,571,142,875,000.00	2,413,946,803,041.06	93.89
Rata-rata		514,228,575,000.00	482,789,360,608.21	93.89

Sumber:

Kantor Dispenda Kota Makassar, tahun 2016

Berdasarkan pada tabel 3, dapat dijelaskan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar tahun anggaran 2011 sampai dengan 2015 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011 sebesar 102,72 persen sehingga tingkat efektivitasnya dikategorikan sangat efektif, pada tahun 2012 sebesar 113,83 persen sehingga tingkat efektivitasnya dikategorikan sangat efektif, pada tahun 2013 sebesar 111,92 persen sehingga tingkat efektivitasnya dikategorikan sangat efektif, pada tahun 2014 sebesar 83,58 persen sehingga tingkat efektivitasnya dikategorikan kurang efektif dan pada tahun 2015 sebesar 80,45 persen sehingga tingkat efektivitasnya dikategorikan kurang efektif.

Dengan demikian rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan keuangan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar adalah sebesar 93,89 persen per tahun. Keadaan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar berada dalam kategori cukup efektif, karena nilai efektivitasnya rata-rata 93,89 persen.

Efisiensi pengelolaan keuangan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar pada penelitian ini adalah berdasarkan pada biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD yang dibanding dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah. Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar adalah belanja tidak langsung/operasi dan belanja langsung/modal, dengan efektivitas belanja tidak langsung/operasi dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Efektivitas Belanja Tidak Langsung/Operasi Dispenda Tahun Anggaran 2011 s.d. 2015

No.	Tahun	Target Belanja Tidak Langsung/Operasi (Rp.)	Realisasi Belanja Tidak Langsung/Operasi (Rp.)	Efektivitas (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2011	26,987,889,000.00	21,400,493,272.00	79.30
2	2012	33,487,380,000.00	26,391,062,636.00	78.81
3	2013	33,677,238,000.00	28,673,977,207.00	85.14
4	2014	84,690,454,000.00	71,304,041,541.00	84.19
5	2015	90,259,039,000.00	64,648,408,341.00	71.63
Jumlah		269,102,000,000.00	212,417,982,997.00	78.94
Rata-rata		53,820,400,000.00	42,483,596,599.40	78.94

Sumber: Kantor Dispenda Kota Makassar, tahun 2016

Berdasarkan pada tabel 4, dapat dijelaskan bahwa tingkat efektivitas belanja tidak langsung/operasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar tahun anggaran 2011 sampai dengan 2015 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011 sebesar 79,30 persen sehingga tingkat efektivitasnya dikategorikan kurang efektif, pada tahun 2012 sebesar 78,81 persen sehingga tingkat efektivitasnya dikategorikan kurang efektif, pada tahun 2013 sebesar 85,14 persen sehingga tingkat efektivitasnya dikategorikan kurang efektif, pada tahun 2014 sebesar 84,19

persen sehingga tingkat efektivitasnya dikategorikan kurang efektif dan pada tahun 2015 sebesar 71,63 persen sehingga tingkat efektivitasnya dikategorikan tidak efektif.

Dengan demikian rata-rata tingkat efektivitas belanja tidak langsung/operasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar adalah sebesar 78,94 persen per tahun. Keadaan ini menunjukkan bahwa efektivitas belanja tidak langsung/operasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar berada dalam kategori kurang efektif.

Sedangkan efektivitas belanja langsung/modal dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Efektivitas Belanja Langsung/Modal Dispenda

Tahun Anggaran 2011 s.d. 2015

No.	Tahun	Target Belanja Langsung/Modal (Rp.)	Realisasi Belanja Langsung/Modal (Rp.)	Efektivitas (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2011	48,440,835,000.00	44,250,526,415.00	91.35
2	2012	59,041,601,000.00	55,598,341,696.00	94.17
3	2013	56,208,000,000.00	48,799,561,638.00	86.82
4	2014	7,078,798,000.00	4,835,274,150.00	68.31
5	2015	5,965,086,100.00	5,555,222,314.00	93.13
Jumlah		176,734,320,100.00	159,038,926,213.00	89.99
Rata-rata		35,346,864,020.00	31,807,785,242.60	89.99

Sumber: Kantor Dispenda Kota Makassar, tahun 2016

Berdasarkan pada tabel 5, dapat dijelaskan bahwa tingkat efektivitas belanja langsung/modal pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar tahun anggaran 2011 sampai dengan 2015 juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011 sebesar 91,35 persen sehingga tingkat efektivitasnya dikategorikan cukup efektif, pada tahun 2012 sebesar 94,17 persen sehingga tingkat efektivitasnya dikategorikan cukup efektif, pada tahun 2013 sebesar 86,82 persen sehingga tingkat efektivitasnya dikategorikan kurang efektif, pada tahun 2014 sebesar 68,31 persen sehingga tingkat efektivitasnya dikategorikan tidak efektif dan pada tahun 2015 sebesar 93,13 persen sehingga tingkat efektivitasnya dikategorikan cukup efektif.

Dengan demikian rata-rata tingkat efektivitas belanja langsung/modal pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar adalah sebesar 89,99 persen per tahun. Keadaan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar berada dalam kategori cukup efektif.

Untuk mengetahui efisiensi pengelolaan keuangan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar maka biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD adalah belanja tidak langsung/operasi dan belanja langsung/modal dibandingkan dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah, maka dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6 Efisiensi PAD Dispenda
Tahun Anggaran 2011 s.d. 2015

No.	Tahun	Realisasi PAD (Rp.)	Belanja (Rp.)	Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2011	277,226,961,668.00	65,651,019,687.00	23.68
2	2012	395,659,198,905.00	81,989,404,332.00	20.72
3	2013	526,504,560,898.00	77,473,538,845.00	14.71
4	2014	569,807,093,328.00	76,139,315,691.00	13.36
5	2015	644,748,988,242.06	70,203,630,655.00	10.89
Jumlah		2,413,946,803,041.06	371,456,909,210.00	15.39
Rata-rata		482,789,360,608.21	74,291,381,842.00	15.39

Sumber: Kantor Dispenda Kota Makassar, tahun 2016

Berdasarkan pada tabel 6, dapat dijelaskan bahwa tingkat efisiensi belanja pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar tahun anggaran 2011 sampai dengan 2015 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011 sebesar 23,68 persen sehingga tingkat efisiensinya dikategorikan cukup efisien, pada tahun 2012 sebesar 20,72 persen sehingga tingkat efisiensinya dikategorikan efisien, pada tahun 2013 sebesar 14,71 persen sehingga tingkat efisiensinya dikategorikan efisien, pada tahun 2014 sebesar 13,36 persen sehingga tingkat efisiensinya dikategorikan efisien dan pada tahun 2015 sebesar 10,89 persen sehingga tingkat efisiensinya dikategorikan efisien.

Dengan demikian rata-rata tingkat efisiensi pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar adalah sebesar 15,39 persen per tahun. Keadaan ini menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar berada dalam kategori efisien, karena nilai efisiensinya rata-rata 15,39 persen.

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar pada tahun 2011 ditargetkan Rp. 269.892.056.000,00 terealisasi Rp. 277.226.961.668,00 atau sebesar 102,72 persen dikategorikan sangat efektif disebabkan oleh optimalnya penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah, pada tahun 2012 ditargetkan Rp. 347.594.900.000,00 terealisasi Rp. 395.659.198.905,00 atau sebesar 113,83 persen dikategorikan sangat efektif disebabkan oleh karena optimalnya koordinasi dengan SKPD pengelola pendapatan unit kerja terkait optimalisasi potensi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, pada tahun 2013 ditargetkan Rp. 470.443.154.000,00 terealisasi Rp. 526.504.560.898,00 atau sebesar 111,92 persen dikategorikan sangat efektif disebabkan oleh karena tingkat kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak daerah dan retribusi daerah, pada tahun 2014 ditargetkan Rp. 681.762.822.000,00 terealisasi Rp. 569.807.093.328,00 atau sebesar 83,58 persen dikategorikan kurang efektif disebabkan oleh karena adanya mutasi pegawai sehingga perlu pembekalan kepada sumber daya manusia serta pada tahun 2015 ditargetkan Rp. 801.449.943.000,00 terealisasi Rp. 644.748.988.242,06 atau sebesar 80,45 persen dikategorikan kurang efektif disebabkan oleh lambatnya perekonomian nasional setidaknya berpengaruh pada iklim investasi yang berimbas langsung pada

pencapaian realisasi beberapa sektor pajak diantaranya pajak BPHTB. Sementara disisi lain NJOP untuk PBB mengalami kenaikan yang bervariasi sehingga untuk transaksi jual beli terkadang tertunda karena nilai pajak yang akan dibayar belum memperhitungkan nilai kenaikan NJOP yang baru meskipun sesungguhnya dasar pembayaran pajak tetap mengacu kepada nilai transaksi sehingga kondisi tersebut menyebabkan beberapa transaksi jual beli berada pada posisi menunggu kepastian menyebabkan pajak BPHTB sampai dengan akhir tahun 2015 tidak dapat terealisasi secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar pada tahun 2011 terealisasi Rp. 277.226.961.668,00 dengan belanja yang dikeluarkan Rp. 65.651.019.687,00 atau sebesar 23,68 persen dikategorikan cukup efisien disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung *online system* dalam melakukan perbaikan *database* wajib pajak dan retribusi daerah, pada tahun 2012 terealisasi Rp. 395.659.198.905,00 dengan belanja yang dikeluarkan Rp. 81.989.404.332,00 atau sebesar 20,72 persen dikategorikan efisien disebabkan oleh karena belum optimalnya layanan pajak daerah dan retribusi daerah yang berbasis IT secara terintegrasi *online* terpadu, pada tahun 2013 terealisasi Rp. 526.504.560.898,00 dengan belanja yang dikeluarkan Rp. 77.473.538.845,00 atau sebesar 14,71 persen dikategorikan efisien disebabkan oleh karena sebagian *database* wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah terpisah-pisah belum terupdate dan terintegrasi secara terpadu kedalam *online system*, pada tahun 2014 terealisasi Rp. 569.807.093.328,00 dengan belanja yang dikeluarkan Rp. 76.139.315.691,00 atau sebesar 13,36 persen dikategorikan efisien disebabkan oleh karena terbatasnya anggaran yang digunakan untuk mendukung penyediaan peralatan secara *online* serta pada tahun 2015 terealisasi Rp. 644.748.988.242,06 dengan belanja yang dikeluarkan Rp. 70.203.630.655,00 atau sebesar 10,89 persen dikategorikan efisien disebabkan oleh karena adanya kerja sama dan koordinasi antar SKPD pengelola pendapatan menggunakan teknologi berbasis IT secara terintegrasi *online* terpadu.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan kinerja pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar pada tahun anggaran 2011 s.d. 2015 sebagai berikut:

Efektivitas pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar berada dalam kategori cukup efektif, karena nilai efektivitasnya rata-rata 93,89 persen.

Efisiensi pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar berada dalam kategori efisien, karena nilai efisiensinya rata-rata 15,39 persen.

Berdasarkan simpulan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran dari hasil penelitian ini yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil analisis efektivitas pendapatan asli daerah yang menunjukkan berada dalam kategori cukup efektif, diharapkan agar Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar secara berkesinambungan dan meningkatkan kinerjanya di tahun-tahun berikutnya dengan tetap menggali potensi sumber pendapatan asli daerah.

Berdasarkan hasil analisis efisiensi belanja yang menunjukkan berada dalam kategori efisien, diharapkan dapat dipertahankan dan dikembangkan pada tahun berikutnya dengan tetap menekan biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta Selatan.
- Darise, Nurlan, 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. PT. Indeks, Jakarta.
- _____, 2009. *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*. Edisi Kedua. PT. Indeks, Jakarta.
- Dharmayanti, 2012. *Efektivitas Pengelolaan Keuangan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan*, Tesis S2 Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi, 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta Selatan.
- Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal, 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- _____, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Kedua. STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mambuhu, Nur Mawati, 2009. *Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai*, Tesis S2 Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar.
- Mulyo, Slamet, 2006. *Analisis Pelaksanaan Kinerja Berbasis Kinerja*, Tesis S2 Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar. (Tidak dipublikasikan).
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti, 2010. *Akuntansi sektor Publik*. Edisi 2. Penerbit Salemba Empat, Jakarta Selatan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang *Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan*, Jakarta.
- Ratnawati, 2014. *Efektifitas Pengelolaan Anggaran pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Gowa Sulawesi Selatan*, Tesis S2 Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar.
- Sutedjo, 2009. *Persepsi Stakeholders Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah (Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional Kabupaten Kendal)*. Tesis S2 Program Pascasarjana. <http://eprints.undip.ac.id/24292/1/Sutedjo.pdf>. Diakses tanggal 1 Juli 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak daerah dan Retribusi daerah*, Jakarta.

Yani, Ahmad, 2009. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Edisi Revisi. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.